

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011, hal.19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat didalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005, hal.25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marginal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

B. Masyarakat

Masyarakat yaitu sekumpulan orang, yang terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu ataupun golongan tak mampu, tinggal di dalam suatu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

Selo Soemardjan memiliki pendapat masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Horton dan Hunt (1989:88) mengungkapkan organisasi manusia yang saling berhubungan itu adalah masyarakat. Sedangkan Mansyur Fakih berkata bahwa pengertian masyarakat adalah adalah sebuah sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan masing-masing bagian acara terus menerus mencari keseimbangan dan harmoni.

Dalam suatu perkembangan daerah, masyarakat bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju. Masyarakat sederhana yaitu sekumpulan masyarakat dengan pola pikir yang kuno dan hanya dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan saja, sedangkan masyarakat maju adalah masyarakat yang mempunyai pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapainya di masa mendatang bersama orang-orang disekitarnya meskipun tidak berada dalam golongan yang sama.

Masyarakat awalnya terbentuk dari sekumpulan orang saja. Misalnya sebuah keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga kemudian berangsur-angsur dari sekeluarga membentuk RT dan RW hingga akhirnya membentuk sebuah dusun. Dusun pun kemudian berkembang menjadi beberapa kecamatan lalu menjadi kabupaten atau kotamadya kemudian sebuah provinsi hingga akhirnya membentuk sebuah Negara.

Masyarakat merupakan gabungan dari individu-individu, oleh karena itu setiap individu harus bisa menjadi masyarakat yang modern, dalam arti tanggap akan perubahan-perubahan zaman, untuk itu masyarakat harus menguasai IPTEK yang semakin hari semakin pesat berkembang. Untuk lebih jelas modernisasi adalah proses perubahan masyarakat dan kebudayaan dalam seluruh aspeknya, dari sistem tradisional menuju ke sistem yang modern.

Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain:

1. Perkembangan ilmu.
2. Perkembangan teknologi.
3. Perkembangan industri.

Social change saat ini adalah gejala sosial yang dijumpai di seluruh dunia dan tidak terbatas pada negara-negara berkembang saja, social change adalah perubahan sosial yang dalam pergaulan hidup manusia dan akibat-akibatnya terhadap pergaulan hidup manusia dan akibat-akibatnya terhadap pergaulan manusia itu sendiri. Perubahan tersebut telah menjadi fakta kehidupan manusia sejak dahulu kala, serta merupakan reaksi atas rangsangan dari luar, perubahan tersebut dapat menimbulkan efek yang positif dan negatif. Proses perubahan masyarakat dan kebudayaan yang dikehendaki dan direncanakan, biasanya dinamakan modernisasi. Proses ini pada intinya berarti meningkatkan kemampuan dari

masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang mencakup:

1. Kebutuhan sandang.
2. Keselamatan terhadap harta benda dan jiwa.
3. Kesempatan yang wajar untuk dihargai.
4. Mendapat kasih sayang dari sesamanya.
5. Kesempatan untuk dapat mengembangkan kemampuan atau potensi.

C. Pemberdayaan Masyarakat Kaitannya dengan Pendidikan Luar Sekolah

Pemberdayaan masyarakat secara substansi berarti proses memajukan, mengembangkan dan memperbesar kemampuan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya diarahkan pada kemajuan fisik (materi) namun juga pada kemajuan nilai non materi. Bangsa Indonesia menyadari bahwa kualitas sumber daya manusianya masih rendah, dan tentunya bangsa ini masih punya satu sikap yakni optimisme untuk mengangkat sumber daya manusia tersebut melalui suatu program pemberdayaan masyarakat. Mengembangkan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang ddalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan dan memampukan masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, tapi dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti mengembangkan masyarakat dari berbagai lini kehidupan.

Namun agaknya lebih populer mengembangkan masyarakat identik dengan mengembangkan dari sudut pandang ekonomi, dalam kaitannya dengan pembangunan bahwa ekonomi merupakan penunjang dari berbagai keberhasilan pembangunan. Indikator suatu masyarakat maju juga dilihat dari tingkat kesejahteraan hidup dalam hal ini ekonomi.

Melihat yang terjadi bahwa proses pengembangan masyarakat kerap kali dilakukan dari atas ke bawah (*top-down*). Masyarakat sering kali dilibatkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Hal ini biasanya di disebabkan adanya anggapan bahwa untuk mencapai efisiennsi dalam

pengembangan, masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisis kondisi untuk merumuskan persoalan serta kebutuhannya. Dalam visi ini masyarakat ditempatkan dalam posisi yang membutuhkan bantuan dari luar. Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah sering sering tidak berhasildan kurang memberi manfaat kepada masyarakat.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat justru menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan menyusahkan masyarakat daripada menolongnya. Bantuan tersebut kadang-kadang tidak sesuai kebutuhan dari *prioritas masyarakat*. Implikasi dari pembangunan secara *top-down* ini, masyarakat mengalami kesenjangan sosial, bahkan ketidak mandirian masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya, hingga terjadi kemiskinan. Menurut Friedman dalam Soeharto, dkk (2006:6), kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basisi kekuasaan sosial meliputi: modal produktif atau aset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), sumber kauangan (pekerjaan, kredit), organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan tujuan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, jasa, penegtahuan dan keterampilan, dan informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Kemiskinan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor yang rumit dan saling terkait erat satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut sering dikatakan sebagai suatu pola lingkaran setan yang sangat sulit untuk dipecahkan. Pola tersebut berlangsung secara terus menerus dan bahkan cenderung menimbulkan dampak yang semakin buruk.

Rendahnya tingkat kualitas hidup akibat minimnya fasilitas dasar, buruknya mutu sumbe daya manusia, etos kerja yang lemah dan sulit berkembang, terbatasnya kemampuan mencari pekerjaan yang layak, rendahnya kemampuan menabung, sulitnya mengakses sumber-sumber permodalan, adlah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kelomok masyarakat miskin dan tertinggal. Oleh karena itu masyarakat miskin perlu diberdayakan untuk lepas dari kondisi kemiskinan dan ketertinggalan, hal ini bisa dilakukan dengan program pemberdayaan yang dilakukan oleh tenaga sosial atau fasilitator.

Pendidikan luar sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi suatu perubahan masyarakat. Peran dan fungsi pendidikan luar sekolah dapat diwujudkan dalam wujud membangun gerakan pembelajaran atau pemberdayaan masyarakat untuk mendorong segera terciptanya transformasi sosial yang agar terciptanya keseimbangan pembangunan, sehingga masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan tertinggal bisa teratasi. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu program pendidikan luar sekolah dalam rangka menolong dan memberdayakan masyarakat miskin dan tertinggal untuk lepas dari permasalahan yang dihadapi.

D. Program Kecakapan Wirausaha (PKW)

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah penting yang harus ditangani dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia saat ini, meskipun dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan. Menurut berita resmi BPS, 18 Juli 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret sebesar 28,01 juta jiwa atau sebesar 10,86% dari total penduduk di Indonesia, sedangkan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2016 sebesar 7,03 juta jiwa atau 5,6 % dari jumlah angkatan kerja sebesar 125,44 juta jiwa (sumber:berita resmi statistik BPS, 7 November 2016). Di sisi lain terdapat anak putus sekolah (drop out) SMK/SMU/MA ditambah lulusan SD dan SMP yang tidak melanjutkan sekolah tahun 2015/2016 sebesar 1.283.379 anak (sumber: Pusat data statistik Pendidikan dan Kemendikbud, 2016).

Keadaan tersebut akan memberikan beban tersendiri bagi pemerintah. Dengan banyaknya putus sekolah (drop out) atau lulus tidak melanjutkan dapat berdampak pada bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, yang selanjutnya akan memicu munculnya permasalahan sosial seperti kejahatan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, perdagangan orang (*trafficking*), maraknya demo yang anarkis, dan lemahnya daya saing bangsa.

Dalam rangka mengatasi permasalahan diatas dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan maka Direktorat Pembinaan kursus dan Pelatihan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana bantuan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) bagi masyarakat.

1. Dasar Hukum

Secara umum dasar pemberian bantuan bagi peserta didik kursus dan pelatihan sesuai dengan mandat:

- a. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- c. Intruksi presiden nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif.
- d. Peraturan menteri keuangan nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/ lembaga.
- e. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 74 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 6 tahun 2016 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. DIPA (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2017).

2. Tujuan Petunjuk Teknis

Tujuan petunjuk teknis program pendidikan kecakapan wirausaha (PKW) adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan acuan teknis kepada semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) sehingga program ini dapat diakses dan dilaksanakan dengan prinsip-

prinsip tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntebel).

- b. Sebagai bagi aparat pengawas fungsional dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dana bantuan penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) tahun 2017.

3. Hakekat Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha

Pendidikan kecakapan wirausaha (PKW) adalah program layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap berwirausaha sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat. Pendidikan kecakapan wirausaha diselenggarakan menggunakan pendekatan “4 in 1” sebagai berikut:

- a. Identifikasi peluang usaha.

Mengidentifikasi peluang usaha baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Mengidentifikasi sumber daya lokal (produk barang atau jasa) yang dapat dikembangkan menjadi usaha baru sesuai peluang pasar pada skala lokal, nasional, atau internasional.

- b. Pembelajaran kewirausahaan berbasis pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berwirausaha.

Pembelajaran program PKW memerlukan kurikulum dan bahan ajar yang mencakup:

- 1) Perubahan pola pikir.
- 2) Membangun karakter pengusaha.
- 3) Memulai usaha.
- 4) Merencanakan usaha.
- 5) Memasarkan dan mengembangkan usaha.
- 6) Kompetensi keterampilan yang sesuai dengan identifikasi peluang usaha.

- c. Evaluasi Hasil Pembelajaran.

Untuk mengukur hasil belajar bahwa peserta didik telah menguasai keterampilan dan memiliki kemampuan berwirausaha, maka setiap

lembaga harus melakukan evaluasi hasil pembelajaran kepada setiap peserta didik.

d. Pendampingan dan perintisan usaha.

Peserta didik yang sudah mengikuti evaluasi pembelajaran program PKW wajib diberikan bimbingan untuk merintis usaha sesuai dengan keterampilan yang dikuasai . pendampingan yang dilakukan lembaga adalah memfasilitasi dalam mengakses dana kepada lembaga keuangan, menjalin kemitraan dengan mitra usaha, pemasaran hasil produksi, pemaganagan hasil usaha dan lain sebagainya.

4. Tujuan Program PKW

Tujuan penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) sebagai berikut:

- a. Memberikan bekal pengetahuan kewirausahaan kepada peserta didik.
- b. Memeberikan bekal keterampilan di bidang produksi barang/jasa kepada peserta didik.
- c. Menanamkan pola pikir (mindset) dan sikap berwirausaha kepada peserta didik.
- d. Mendorong dan menciptakan rintisan usaha baru melalui kursus dan pelatihan yang didukung oleh dunia usaha dan industri, mitra usaha dan dinas/ instansi terkait, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

5. Penyelenggara Program PKW

Program PKW dapat diselenggarakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan PAUD.
- b. Lembaga/yayasan/sekolah.
- c. Badan usaha/ industri.
- d. Perguruan tinggi.
- e. Organisasi mitra

6. Peserta Didik PKW

Sasaran penerima bantuan PKW adalah setiap warga negara Indonesiayang berusia 16-40 tahun, putus sekolah atau tidak lulus melanjutkan dan/atau belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur.

7. Pendidik/Instruktur PKW

Pendidik atau instruktur program PKW terdiri dari:

- a. Instruktur keterampilan yang memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- b. Instruiktur kewirausahaan yang memiliki pengalaman berwirausaha dan/atau pernah menjadi instruktur kewirausahaan.

8. Pelaksanaan Program PKW

Memiliki kurikulum dan bahan pembelajaran minimal 150 jam @60 menit (terdiri dari 50 jam materi kewirausahaan dan 100 jam materi keterampilan). Proses pembelajaran teori 30% dan praktek 70%.

9. Sarana Prasarana Pembelajaran

Menyediakan sarana-praasarana pembelajaran teori dan praktik, sesuai dengan jenis keterampilan yang diusulkan.

10. Proses Kegiatan PKW

Tahapan kegiatan dalam penyelenggaraan program PKW adalah sebagai berikut:

- a. Rekrutmen peserta didik.
- b. Proses Pembelajaran Teori Dan Praktik (Keterampilan Dan Kewirausahaan).
- c. Evaluasi Pembelajaran.
- d. Pendampingan rintisan usaha minimal 3 (tiga) bulan.

11. Evaluasi

Untuk mengukur pencapaian hasil belajar bahwa peserta didik telah menguasai keterampilan dan memiliki kemampuan berwirausaha, maka setiap lembaga harus melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran kepada setiap peserta didik. Untuk penerima dana bantuan wajib mempublikasikan dalam bentuk media yang dapat dilihat masyarakat (spanduk, brosur, koran, atau bentuk lain) bahwa program ini terselenggara atas bantuan dan kerjasama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

E. Tata Boga

Tata boga adalah pengetahuan di bidang boga (seni mengolah masakan) yang mencakup ruang lingkup makanan, mulai dari persiapan pengolahan sampai dengan menghidangkan makanan itu sendiri yang bersifat tradisional maupun Internasional. Berbagai prinsip prinsip dasar utama dan tata cara memasak yang umum dilaksanakan dibagian boga (*Bartono:2010*).

Secara umum pengertian tata boga adalah pengetahuan mengenai cara atau teknik mengolah makanan. Mulai dari mempersiapkan bahan-bahan dan peralatan memasak, mengolah bahan-bahan tersebut hingga menyajikannya. Di dalam tata boga selain mempelajari masakan tradisional kita juga dapat mempelajari masakan internasional dari penjuru dunia.

Dalam tata boga ada beberapa prinsip atau teknik dasar pengolahan makanan diantaranya, *blanching, poaching, boiling, streaming, braising, roasting, dan baking, griling dan broiling, pan frying, sauteing, deep frying*, dan sebagainya. Walaupun terdengar asing namun pada dasarnya kita sangat mengenal teknik-tekniknya.

Seperti *poacing dan boiling* yang dalam bahasa Indonesia artinya merebus atau memasak makanan di dalam cairan seperti air, dan disertai dengan bumbu-bumbu lain. *Poacing* dilakukan dengan memanaskan cairan terlebih dahulu hingga mendidih, kemudian api dikecilkan dan bahan makanan di masukan. Sementara *boiling* dilakukan dengan cara merebus makanan sampai dengan titik didihnya yang ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung pada cairan.

Ada juga *steaming* atau mengukus yang dilakukan dengan memanfaatkan uap air panas dalam tempat tertutup untuk memasak makanan. Dengan mengukus makanan yang dihasilkan lebih padat dan lembut serta terjaga volumenya. Jika kita ingin menghilangkan kulit sayuran atau lapisan luar daging dengan tetap mempertahankan cita rasa, nutrisi dan penampilan makanan kita dapat menggunakan teknik *blanching*. Teknik ini dilakukan dengan cara merendam sebentar makanan di dalam air mendidih atau air setengah matang.

Bahan yang direbus harus terendam seluruhnya dalam zat cair. Untuk memperoleh hasil yang terbaik dan tetap tersimpannya sari rasa dan vitamin yang dikandung oleh bahan yang direbus, maka dianjurkan untuk memasukkan bahan yang direbus dalam zat cair yang sedang mendidih; khususnya semua sayuran hijau, kecuali semua umbi-umbian direbus mulai dari zat cair yang tidak mendidih. Busa yang timbul pada saat perebusan harus segera dihilangkan. Tempat perebusan umbi-umbian boleh ditutup akan tetapi tidak disarankan untuk sayuran hijau karena akan mengubah warna. Untuk membuat sari pati ayam dan daging perebusan dilakukan lambat (dengan api kecil; lama perebusan 6 sampai 7 jam).

1. Merebus Mandi (*E: poaching ; F: p  cher*) adalah memasak dalam zat cair dibawah 100  C.

Prinsip:

- a. Bahan yang direbus-mandi harus terendam seluruhnya dalam zat cair. Dididihkan air sampai 100 C, kurangi suhunya (hentikan proses pendidihan) barulah bahan dimasukkan.
 - b. Khusus untuk ikan besar yang akan direbus-mandikan diawali dari zat cair yang dingin dan dipanaskan sampai pada titik didih, namun tidak boleh mendidih. Ikan yang dipotong (Ikan irisan) direbus-mandikan dalam zat cair yang panas.
 - c. Buah-buahan yang direbus-mandikan dengan sirup dan setelah selesai didinginkan dalam cairan hasil rebus mandi.
2. Menanak (*E: steaming ; F: Vapeurer*) memasak mempergunakan uap, hal ini dilakukan dalam ketel-ketel dengan tekanan tidak boleh lebih dari 0.16kg/cm.

Prinsip:

- a. Proses ini hanya dilakukan pada bahan yang memerlukan waktu memasak yang lama (biji-bijian, padi-padian, umbi-umbian) dan tidak mengalami perubahan warna.
 - b. Hasil yang terbaik diperoleh apabila tempat menanak tertutup rapat, agar uap dapat memasak dengan efektif. Umbi-umbian, biji-bijian dan padi-padian yang ditanak sebaiknya menggunakan nampan yang berlubang sehingga uap dapat masuk dari semua sudut.
 - c. Untuk beberapa resep yang lembut adonannya (roti kukus, kuwe mangkok dsb). Penutup tempat menanak dilapisi dengan kain agar kondensasi tidak jatuh pada adonan.
3. Menyemur (*E: Stewing ; F: Etuvier*) memasak dengan uap dan zat cair. Dalam praktik sering kali menanak dan menyemur terancu istilahnya; khususnya diboga negara-negara Barat.

Prinsip:

- a. Bahan yang disemur harus terendam dalam zat cair.
 - b. Proses semur harus lambat.
 - c. Bahan yang paling sesuai untuk disemur adalah bahan yang kenyal (daging, sayur-sayuran yang keras).
 - d. Saus yang dihasilkan disajikan bersama dengan bahan yang disemur.
 - e. Diproses didalam panci langsung diatas api.
4. Memanggang (*E: grilling or broiling ; F: grillier*).

Memanggang yang dimaksud dengan memanggang disini adalah proses memasak dimana bahan yang dipanggang langsung berhubungan dengan sumber api.

Prinsip:

- a. Bahan yang dipanggang harus terpotong kecil.
- b. Bahan yang dipanggang harus yang terbaik mutunya.
- c. Bahan yang dipanggang harus selalu diminyaki.
- d. Panas sumber api harus diatur sehingga terbentuk “kulit” pada permukaan bahan yang dipanggang, serta hasil pemanggangannya harus kering basah (tidak boleh kering).

- e. Panggang harus selalu dalam keadaan bersih agar bahan yang dipanggang tidak melengket pada jari-jari panggang.

5. Membakar (*E: baking ; F: rôtier au four*).

Membakar yang dimaksud dengan membakar adalah proses memasak didalam oven tanpa mempergunakan bahan pembantu yang lain. Prinsip utama dalam proses ini adalah suhu oven yang tepat untuk setiap bahan yang dibakar.

6. Menumis (*E: shallow frying ; F: sauter*) adalah menggoreng dengan minyak yang sedikit.

Prinsip:

- a. Bahan harus terpotong kecil.
- b. Bahan umbi-umbi-an, sayuran keras sebaiknya direbus sebelum ditumis, sayuran lembut dapat ditumis langsung.
- c. Lemak yang dipergunakan untuk menumis harus panas, namun tidak boleh berubah warna dan jumlah sedikit.

7. Menggoreng (*E: deep frying ; F: frituer*) adalah proses memasak dengan mempergunakan minyak yang banyak.

Prinsip:

- a. Minyak yang dipergunakan harus selalu dalam keadaan jernih.
- b. Minyak harus mencapai 160° Celcius – 195° Celcius.
- c. Bahan yang akan digoreng umumnya diselimuti dengan adonan.
- d. Kentang, pisang, krupuk, emping harus dalam keadaan kering pada waktu digoreng.
- e. Hindari peluapan minyak pada saat menggoreng dan disarankan untuk mempergunakan sarangan penggoreng Hindari suhu minyak yang berlebihan karena hal ini akan berpengaruh pada gizi.

8. Memasak dengan Gelombang Mikro adalah cara memasak dengan mempergunakan microwave oven.

Prinsip kerja oven gelombang mikro ini adalah penggesekkan antar molekul bahan yang dimasak sehingga terjadi panas. Sehingga umumnya bahan yang dimasak akan matang dari bagian dalamnya. Perkembangan

terakhir dari alat ini adalah dengan dilengkapinya oven ini dengan sinar infra merah yang membantu terbentuknya pewarnaan pada bahan yang dimasak. Hampir semua cara masak (kecuali menggoreng) dapat dilakukan dengan alat ini.

F. Konsep Kesejahteraan

Menurut undang-undang no 11 tahun 2009 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator, yaitu: rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), jati diri (*identity*). Biro pusat statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: tingkat pendapatan keluarga. Tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintaro (1989), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek: Dengan melihat pada perkembangan fisik (*sonmatic status*) seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup dengan melihat pada tingkat mentalnya, (*mental/educational status*) seperti pendidikan, pekerjaan, dengan melihat pada integrasi dan kedudukan sosial (*social status*). Todaro (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih

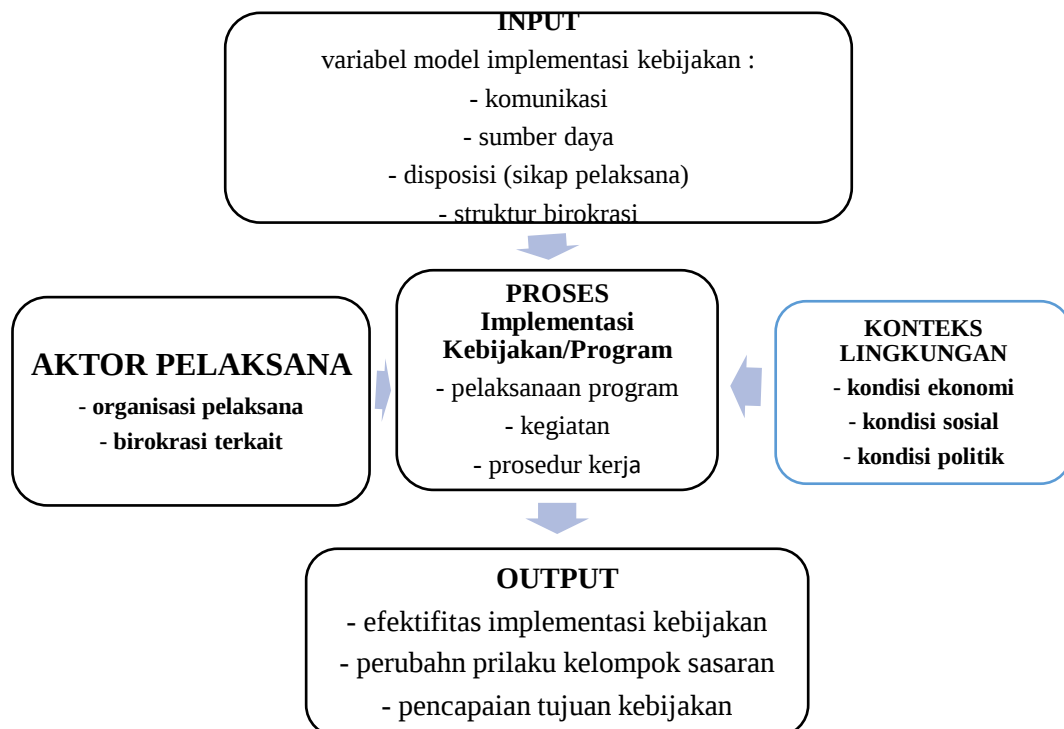
baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.

G. Penelitian Relevan

1. Menurut *Kartasmita* terhadap penelitian terhadap pemberdayaan kewirausahaan tahun 1996, dengan melihat tugas dan fungsi fasilitator pemberdayaan masyarakat maka terlihat ketua PKBM dituntut untuk memiliki konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan tentang nilai-nilai sosial dalam mengelola kegiatan Program Kecakapan Wirausaha hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang dalam kondisi ketidakberdayaan dibantu menjadi sadar akan potensi yang dimiliki untuk dapat hidup mandiri mengatasi masalah-masalah kehidupannya dengan cara pelatihan ketrampilan, memotivasi dan memberikan dorongan baik sarana maupun prasarana.
2. Menurut Sri Hartini terhadap penelitian pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengolahan ketela menjadi olahan makanan dengan judul “Program Pemberdayaan Masyarakat melalui usaha Pengolahan ketela menjadi olahan makanan lokal di Desa Karangcegak, Kutasari, Purbalingga Jawa Tengah” penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model deskriptif dengan hasil realisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha pengolahan ketela menjadi olahan makanan lokal di desa Kertasari, Karangcegak, Purbalingga, Jawa Tengah.
3. Menurut Dedy Charisma terhadap penelitian pemberdayaan masyarakat melalui aksara kewirausahaan dengan judul “pemberdayaan masyarakat melalui program aksara kewirausahaan ternak kelinci (Penelitian Deskriptif di Balai Belajar bersama Hj. Mudrikah, Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program aksara kewirausahaan ternak kelinci dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelatihan, pelaksanaan dan pendampingan pelaksanaannya program aksara kewirausahaan ternak.

H. Kerangka Pemikiran

1. Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pasal 28 B ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
2. PKBM Riyadlushshorpiyyah merupakan salah satu PKBM penyelenggara kegiatan PKW di Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat Purbaratu dari pembelajaran Program Kecakapan Wirausaha yang dilaksanakan di PKBM Riyadlushshorpiyyah.
4. Menurut George C. Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran Edward III digunakan untuk menganalisis proses implementasi program pemberdayaan warga belajar. Peneliti menelaah bagaimana komunikasi antar pelaksana berlangsung, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana terhadap program, serta bagaimana struktur birokrasi dan SOP mendukung atau menghambat implementasi.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran